

# **EUFEMISASI DAN SENSORISASI DALAM WACANA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2019 SERTA RELEVANSINYA DALAM PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA**

Hafidz Zulfahmi Ismail, Prof. Dr. Jufri, M.Pd. dan Dr. Abdul Azis, M.Pd., M.T.  
Pascasarjana Universitas Negeri Makassar

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan (1) bentuk dan makna eufemisasi dalam wacana pemilu presiden dan wakil presiden 2019, (2) bentuk dan makna sensorisasi dalam wacana pemilu presiden dan wakil presiden 2019, dan (3) relevansi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, Data penelitian berupa elemen eufemisasi dan elemen sensorisasi. Sumber data penelitian adalah media daring yaitu *CNN Indonesia*, *Detik*, dan *Kompas*. Data dikumpulkan dari bulan Oktober s.d. Desember 2018. Teknik pengumpulan data digunakan adalah teknik dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data penelitian digunakan triangulasi sumber data. Teknik analisis data digunakan model interaktif Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil penelitian diolah secara deskriptif dan interpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) elemen eufemisasi ditemukan berupa bentuk kepercayaan, bentuk kewajiban, bentuk kepedulian, bentuk pujian, bentuk pemberian, bentuk harapan, bentuk belas kasihan, bentuk imbauan, bentuk persaudaraan, bentuk menyarankan, dan bentuk penegasan; (2) Elemen sensorisasi berupa bentuk kriminal, bentuk ketidakpantasan, bentuk asusila, bentuk menuduh, bentuk ancaman, bentuk sindiran, bentuk kecurigaan, bentuk kekecewaan, dan bentuk pelanggaran. Aspek kebahasaan ditemukan kosakata asing, kata (nomina, adjektiva, dan verba), frasa (nomina, adjektiva, dan verba), klausa, dan kalimat (deklaratif, harapan, pengingkaran, ajakan, interjeksi, tanya, dan larangan); (3) Relevansi penelitian ini berupa model analisis eufemisasi dan sensorisasi yang dapat menjadi bahan acuan untuk menganalisis teks editorial dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMA kelas XII.

**Kata Kunci:** Eufemisasi, Sensorisasi, Wacana Pemilu, Pembelajaran Bahasa Indonesia.

## **I. Pendahuluan**

Bahasa memiliki unsur ideologi, Eriyanto (2003:13) mengemukakan bahwa ideologi adalah hal yang sangat sentral dalam analisis wacana karena teks dan percakapan merupakan bentuk dari praktik ideologi atau pencerminan dari ideologi tertentu. Ideologi tersebut tercermin dari pemakaian kosakata, kalimat, dan wacana tertentu. Bahasa tidak dimaknai sebagai sesuatu yang netral, tetapi terintegrasi dengan ideologi yang membawa muatan kekuasaan tertentu. Media sangat berperan dalam membawa muatan kekuasaan tertentu karena media tidak terlepas dari ideologi.

Media massa sebagai salah satu penyedia informasi sudah menjadi bagian yang penting dalam kehidupan masyarakat. Menurut Basit (2007:296), media

massa berada di tengah realitas sosial (masyarakat) yang sarat dengan berbagai kepentingan dan fakta yang kompleks serta beragam. Bahkan, media terlebih dalam posisinya sebagai institusi informasi, dapat pula dipandang sebagai faktor yang menentukan dalam proses-proses perubahan sosial dan politik (Basit, 2007:297). Oleh karena itu, media berpengaruh besar pada perubahan kekuasaan ataupun dominasi sosial yang erat kaitanya dengan kekerasan simbolik.

Kekerasan simbolik dalam pengertiannya adalah sebuah model dominasi sosial yang berlangsung secara tidak sadar dalam kehidupan masyarakat yang meliputi tindakan diskriminasi terhadap kelompok/ras/gender tertentu. Kekerasan simbolik bisa mewujudkan melalui penggunaan bahasa penghalusan, pengaburan, atau bahkan pengasaran fakta. Selain itu, kekerasan simbolik terjadi dalam isi bahasa seperti sesuatu yang diucapkan, disampaikan, atau diekspresikan.

Secara garis besar, kekerasan simbolik dapat diartikan sebagai kekerasan yang secara paksa mendapat kepatuhan yang tidak dirasakan sebagai paksaan dengan bersandar pada harapan-harapan kolektif dari kepercayaan-kepercayaan yang sudah tertanam secara sosial. Kekerasan simbolik bekerja dengan mekanisme penyembunyian kekerasan yang dimiliki, menjadi sesuatu yang diterima sebagai “yang memang seharusnya demikian”. Bourdieu mengatakan Mekanisme kekerasan simbolik berjalan dengan dua cara, yaitu mekanisme eufemisasi dan mekanisme sensorisasi (Jufri & Tolla, 2017:7).

Sehubungan dengan bentuk kekerasan simbolik yakni eufemisasi dan sensorisasi patut diduga bentuk yang lain pun masih dapat dijumpai dalam media massa khususnya dalam wacana pemilu presiden dan wakil presiden 2019. Hal tersebut menjadi sesuatu yang penting untuk diteliti karena dalam objek penelitian ini rentan akan terjadinya kekerasan simbolik. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa tindak kekerasan tidak hanya kekerasan fisik, tetapi kekerasan juga bisa melalui bahasa. Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara khusus dan mendalam mengenai “eufemisasi dan sensorisasi dalam wacana pemilu presiden dan wakil presiden 2019”.

## II. Kajian Pustaka

Teori yang relevan dalam penelitian ini meliputi analisis wacana kritis, relasi antara bahasa dan kekuasaan, kekerasan simbolik, eufemisme dan sensorisasi, dan pembelajaran bahasa Indonesia.

### 1. Analisis Wacana Kritis

Analisis wacana kritis menurut Darma (2009:49) merupakan sebuah upaya atau proses penguraian untuk memberikan kejelasan dari sebuah teks (realitas sosial) yang mau atau sedang dikaji oleh seseorang atau kelompok dominan yang mempunyai tujuan tertentu untuk memperoleh apa yang diinginkan. Analisis wacana kritis mengkaji tentang upaya kekuatan sosial, dominasi, dan kepentingan yang direproduksi dan dipertahankan melalui teks yang pembahasannya dihubungkan dengan konteks sosial dan politik mempunyai tujuan dan asumsi. Analisis wacana kritis digunakan untuk melakukan kajian tentang hubungan-hubungan antara wacana dan perkembangan sosial dalam domain-domain sosial (Jorgensen dan Philips, 2010:114).

Analisis wacana kritis, bersifat “kritis” maksudnya adalah bahwa analisis ini bertujuan mengungkap peran praktik kewacanaan dalam upaya melestarikan dunia sosial, termasuk hubungan sosial yang melibatkan hubungan kekuasaan yang tak sepadan. Tujuan analisis wacana kritis menurut Habermas (dalam Darma, 2009:53) adalah untuk mengembangkan asumsi-asumsi yang bersifat ideologis yang terkandung di balik kata-kata dalam teks atau ucapan dalam berbagai bentuk kekuasaan. Analisis wacana kritis bermaksud untuk menjelajahi secara sistematis tentang keterkaitan antara praktik-praktik diskursif, teks, peristiwa, dan sosial. Terdapat tiga hal yang penting dalam analisis wacana kritis, yakni: (1) wacana, (2) teks, dan (3) konteks (Jufri, 2008: 3).

## 2. Relasi antara Bahasa dan Kekuasaan

Bahasa yang mengandung makna kekuasaan tersebut diungkapkan secara terang-terangan dan juga secara terselubung. Pilihan bahasa kekuasaan dapat dibagi atas lima kategori, yaitu: (1) kelompok atau individu biasanya patuh karena dapat memperoleh imbalan yang mendominasi, baik secara kelompok maupun individu, (2) pendominasi suatu kelompok atau individu karena yang terdominasi menghindari hukuman dari yang mendominasi, (3) orang yang didominasi patuh dan mempunyai kewajiban untuk mematuhi karena ia percaya bahwa orang yang mendominasi tersebut memiliki hak untuk membimbing, menyuruh, dan memberhentikan, (4) pendominasi suatu kelompok atau individu karena ia percaya bahwa orang yang mendominasi mempunyai pengetahuan terbaik untuk melakukan sesuatu, dan (5) pendominasi suatu kelompok atau individu karena ia mengagumi dan memperoleh penguatan dari pendominasi.

Istilah kekuasaan (*power*) menjadi bagian sentral dalam setiap analisis. Kekuasaan Van Dijk dan Wetherell, dkk (dalam Jufri, 2008:43) dapat dimaknai dua konsep, yaitu (1) di satu sisi, wacana dapat dipakai untuk memperbesar pengaruh kekuasaan dan (2) di sisi lain, pada hakikatnya setiap komunitas tertentu mempunyai kekuasaan berbeda. Kekuasaan yang berbeda pada akhirnya dapat memengaruhi seseorang yang berperan dalam mendefinisikan wacana. Prinsip kekuasaan merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan dalam menganalisis suatu teks karena setiap wacana dipandang sebagai pertarungan kekuasaan. Jufri (2008: 86-87) menyebutkan tiga sumber kekuatan dasar yang dapat dilakukan untuk memperoleh kekuasaan, yakni: (1) paksaan, (2) penghargaan materil, dan (3) penghargaan simbolis.

## 3. Kekerasan Simbolik

Dominasi yang mengambil bentuk halus yang disebut Bourdieu sebagai kekerasan simbolik (*symbolic violence*), yaitu sebuah kekerasan yang lembut (*a gentle violence*), sebuah kekerasan yang tak kasat mata (*imperceptible and visible*) (Fashri, 2014:143). Kekerasan simbolik selalu mengandaikan bahasa sebagai alat efektif untuk melakukan “dominasi terselubung.” bahasa sebagai sistem simbolik tidak saja dipakai sebagai alat komunikasi, tetapi berperan sebagai instrumen kekuasaan dengan memanfaatkan mekanisme kekerasan simbolik (Fashri, 2014:145). Bordieu menyatakan bahwa bahasa berhubungan dengan kekuasaan.

Konsep kekerasan simbolik (*symbolic violence*) milik Pierre Bourdieu berangkat dari pemikiran adanya struktur kelas dalam formasi sosial masyarakat, merupakan sebuah perangkat jaringan yang secara sistematis berhubungan satu sama lain. Kekerasan simbolik dalam pengertiannya adalah sebuah model dominasi sosial yang berlangsung secara tidak sadar dalam kehidupan masyarakat yang meliputi tindakan diskriminasi terhadap kelompok/ras/gender tertentu. Mekanisme kekerasan simbolik berjalan dengan dua cara, yaitu eufemisasi dan sensorisasi (Rusdiarti, 2003:38). Proses eufemisasi dan sensorisasi sebagai elemen kekerasan simbolik sangat efektif bila dilakukan melalui bahasa. Selain itu, pada kedua elemen tersebut bahasa menjadi sarana penyampai kekerasan simbolik yang ingin dipraktikkan.

#### 4. Eufemisasi dan Sensorisasi

##### a. Eufemisasi

Bourdieu (dalam Rusdiarti, 2003:38) mekanisme kekerasan simbolik bekerja melalui dua cara, yaitu eufemisasi dan sensorisasi. Eufemisasi adalah elemen kekerasan simbolik yang tidak tampak, bekerja secara halus, tidak dapat dikenali, dan berlangsung di alam bawah sadar (Bourdieu,1980:219). Selanjutnya, mekanisme dalam eufemisasi yaitu tersembunyi, halus, masif, dan bawah sadar. Bentuk-bentuk elemen eufemisasi dapat berupa kepercayaan, kewajiban, kesetiaan, sopan santun, pemberian, pahala, dan belas kasihan.

Eufemisasi tidak hanya melihat pada persoalan penghalusan bahasa, tetapi juga menyangkut penyamaran maksud, atau makna di balik sebuah tuturan (lisan), maupun tulisan, sehingga sulit untuk dikenali dan bahkan dirasakan sebagai sesuatu yang wajar. Oleh karena itu, teori kekerasan simbolik menganggap bahwa ada dua proses yang sedang berjalan dalam sebuah peristiwa komunikasi berbahasa, yakni praktik berbahasa (komunikasi), dan praktik sosial (memengaruhi dan menguasai pikiran seseorang melalui ideologi yang dimuat oleh bahasa).

##### a. Sensorisasi

Sensorisasi diartikan sebagai sebuah proses yang menjadikan kekerasan simbolik tampak sebagai bentuk dari pelestarian semua bentuk nilai yang dianggap sebagai moral kehormatan yang dipertentangkan dengan moral rendah (Bourdieu,1980:219). Selanjutnya, sensorisasi dikategorikan menjadi dua bagian yakni moral kehormatan dan moral rendah. Moral kehormatan merupakan perwujudan nilai-nilai kebaikan, seperti kesantunan dan kesucian. Sebaliknya, moral rendah merupakan perwujudan nilai-nilai buruk, seperti kekerasan, kriminal, ketidakpantasan, asusila, dan kerakusan.

#### 5. Pembelajaran Bahasa Indonesia

Hasil penelitian eufemisasi dan sensorisasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Materi pembelajaran bahasa Indonesia yang memiliki kaitan dengan penelitian ini adalah materi teks editorial pada kelas XII semester ganjil. Teks editorial adalah teks yang berisi tentang pendapat pribadi seseorang pada suatu isu atau masalah aktual. Isu tersebut meliputi masalah sosial, politik atau ekonomi yang memiliki

hubungan signifikan dengan masalah politik. Berdasarkan dari pengertian tersebut, teks editorial dan objek penelitian ini yaitu wacana pemilu presiden dan wakil presiden 2019 memiliki keterkaitan.

Kompetensi dasar 3.6 yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Siswa tidak hanya menganalisis unsur kebahasaan teks editorial. Akan tetapi, siswa dapat menganalisis teks editorial dengan merujuk pada elemen kekerasan simbolik dengan mengetahui bentuk dalam teks tersebut apakah bersifat; 1) kepercayaan, 2) kewajiban, 3) kesetiaan, 4) sopan santun, 5) pemberian, 6) hutang, 7) pahala, 8) belas kasihan, 9) kesantunan, 10) kesucian, 11) kedermawanan, 12) kekerasan, 13) kriminal, 14) ketidakpantasan, 15) asusila, dan 16) kerakusan.

### III. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan pendekatan analisis wacana kritis (AWK), ditinjau dari sudut analisis datanya.

#### 2. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada bentuk eufemisasi dan sensorisasi dalam wacana pemilu presiden dan wakil presiden 2019.

#### 3. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini berupa bentuk eufemisasi dan sensorisasi yang diperoleh dari media daring dalam wacana pemilu presiden dan wakil presiden 2019. Sumber data dalam penelitian ini adalah bentuk teks dari media daring antara lain: *Detik.com*, *CNN Indonesia*, dan *Kompas*. Edisi Oktober 2018 sampai Desember 2018.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumen. Teknik dokumen digunakan untuk mengumpulkan data tertulis yang dilakukan dengan menetapkan teks berita dari beberapa media daring.

#### 5. Analisis Data

Data yang terkumpul melalui teknik dokumen dari media daring dianalisis berdasarkan teori Pierre Bourdieu.

### IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Bentuk dan Makna Eufemisasi dalam Wacana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019

##### a. Kepercayaan

Kepercayaan adalah anggapan atau keyakinan bahwa sesuatu yang dipercayai itu benar, dilakukan/digambarkan dengan berusaha meyakinkan pihak lain mengenai sesuatu hal yang telah dirasakan dan diyakini kebenarannya. Pada sebuah wacana, bentuk kepercayaan dimaksudkan untuk membangun atau mempertahankan kepercayaan yang sudah dimiliki. Bentuk eufemisasi ini dapat dilihat pada data berikut ini.

- (1) “*Saya tidak pernah ragu* dengan komitmen pak SBY, beliau pemimpin negara dan mantan jenderal dan tentara,” tegas Prabowo. (SDC10.BC5/21.12.2018)

Data (1), pernyataan Prabowo tersebut dikemukakan saat mengunjungi SBY di kawasan Mega Kuningan, Jakarta. Pertemuan tersebut membahas tentang Pilpres 2019. Dalam pertemuan tersebut, mereka sepakat untuk menjalankan kampanye politik dan pemilu yang sudah ditentukan dalam sistem dan UU yang berlaku. SBY yang merupakan mantan presiden Indonesia serta mantan jenderal dan prajurit yang tidak diragukan lagi dalam hal komitmen beliau. Hal tersebut ditegaskan oleh Prabowo yang menyatakan bahwa dia tidak pernah ragu dengan komitmen pak SBY, karena SBY merupakan sosok yang matang dalam hal hitung-hitungan politik. Ditinjau dari aspek kebahasaan yakni klausa “saya tidak pernah ragu.” Klausa tersebut menandakan adanya kepercayaan Prabowo terhadap komitmen SBY.

Prabowo sebagai calon presiden mempunyai harapan yang besar kepada SBY untuk bisa menyelesaikan Pilpres 2019. SBY merupakan mantan presiden ke lima RI dan dua kali terpilih sebagai presiden Indonesia, hal tersebut menjadi salah satu faktor perubahan politik Pilpres 2019 jika SBY mendukung salah satu kandidat capres. Arah dukungan SBY sangatlah penting dalam Pilpres 2019, karena SBY dianggap masih berpengaruh di masyarakat. Di sisi lain, Prabowo sangat mempercayai komitmen SBY untuk mendukungnya di Pilpres. Prabowo menilai SBY bukanlah orang yang mudah merubah sikap politik atau SBY ialah orang yang sangat hati-hati untuk menentukan sikap politik. Oleh karena itu, Prabowo tidak akan pernah ragu dengan SBY dalam menyelesaikan Pilpres 2019.

Data (1) bermakna membangun atau menanamkan kepercayaan antara Prabowo dan SBY yang merupakan koalisi dalam pemilihan presiden. Kepercayaan antar koalisi partai harus dibangun agar dalam proses untuk menyelesaikan Pilpres dan pileg dapat berjalan dengan baik. Prabowo sangat percaya atas komitmen SBY yang memilih mendukung Prabowo-Sandi dibandingkan mendukung Jokowi-Ma'ruf dalam Pilpres. SBY pasti mempunyai pertimbangan yang matang sehingga mempercayakan Prabowo-Sandi dalam Pilpres 2019.

#### b. Kewajiban

Kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Pada sebuah wacana, bentuk tersebut dimaksudkan untuk membangun atau menyeruhkan kewajiban yang harus dilaksanakan. Bentuk eufemisasi ini dapat dilihat pada data berikut ini.

- (2) “Agar kampanye yang sifatnya provokatif, ujaran kebencian, fitnah, dan lain sebagainya itu, *dihentikan*, dikurangi, diminimalisasi,” kata Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani. (SDC3.BC3/21.12.2018)

Data (2), Asrul Sani selaku Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf menilai kampanye yang dilakukan selama ini rentan atau sifatnya provokatif. Dalam kampanye selalu terdapat ujaran kebencian, fitnah, yang dapat menimbulkan hal-hal negatif di antara dua kubu yang berada dalam Pilpres 2019. Asrul Sani menginginkan hal tersebut untuk dihentikan, dikurangi, dan diminimalisasi. Kampanye yang bersifat provokatif akan mempengaruhi masyarakat yang belum menentukan pilihannya.

Pernyataan Asrul Sani tersebut dikemukakan karena kampanye sudah tidak mengedepankan lagi hal positif, seperti mengemukakan visi dan misi, memberikan penjelasan program yang ingin dilakukan oleh capres dan cawapres, dan saling menghormati antarkubu yang bertarung dalam Pilpres 2019. Jika kampanye yang bersifat negatif masih dilakukan maka akan menimbulkan konflik horizontal maupun vertikal. Asrul Sani sebagai wakil ketua TKN Jokowi-Ma'ruf menginginkan agar Pilpres 2019 tidak diisi dengan hal negatif seperti, provokatif, ujaran kebencian, fitnah, tetapi diisi dengan hal positif sehingga masyarakat secara tidak langsung mendapatkan pendidikan politik yang baik. Oleh karena itu, Asrul Sani menegaskan agar kampanye bersifat negatif harus dihentikan dan itu merupakan suatu kewajiban. Ditinjau dari aspek kebahasaan yakni kata "dihentikan" pada data tersebut. Kata tersebut menunjukkan suatu kewajiban yang harus dilakukan.

Data (2) bermakna menyatakan bahwa kampanye yang bersifat provokatif, ujaran kebencian, fitnah, dan lain sebagainya merupakan kewajiban kita untuk menghentikannya. Kampanye yang bersifat provokatif dapat berdampak buruk terhadap proses Pilpres 2019. Oleh karena itu, kewajiban setiap pihak agar menghentikan kampanye yang bersifat negatif, demi terjaganya keamanan dan persatuan.

### c. Kepedulian

Kepedulian ialah cara memelihara hubungan dengan orang lain yang bermula dari perasaan dan ditunjukkan dengan perbuatan seperti memperhatikan orang lain dan menolong. Pada sebuah wacana, bentuk tersebut dimaksudkan untuk membangun atau menyeruhkan kepedulian yang harus dilaksanakan. Bentuk eufemisasi ini dapat dilihat pada data berikut ini.

- (3) 'Hari ini (remaja) akan melakukan *kegiatan kemanusiaan*, menolong para korban tsunami di Banten dan di Lampung,' kata Ma'ruf. (SDC37.BC24/ 24.12.2018)

Data (3), menjelaskan bahwa telah terjadi bencana tsunami di Banten dan Lampung. Kejadian tersebut membuat tokoh masyarakat maupun tokoh agama untuk turut membantu korban tsunami. Ma'ruf Amin sebagai cawapres nomor urut 01 tidak menyia-nyiakan kesempatan ini untuk melakukan kegiatan kemanusiaan untuk korban tsunami di Banten dan Lampung. Ma'ruf Amin menghimbau kepada remaja yang tergabung dalam relawan milenial Joko Widodo-Ma'ruf Amin untuk membantu korban yang terdampak bencana tsunami di beberapa wilayah di Banten.

Korban tsunami di wilayah Banten dan Lampung perlunya bantuan. Peserta Pilpres telah melakukan rangkaian kegiatan untuk membantu korban tsunami. Akan tetapi, situasi seperti ini sangat dimanfaatkan untuk mendulang dukungan bagi peserta Pilpres. Relawan mendirikan posko bantuan dan menyalurkan bantuan menggunakan label nomor urut capres-cawapres, secara tidak langsung menumbuhkan minat korban untuk mendukung capres-cawapres yang membantu mereka. Ditinjau dari aspek kebahasaan yakni frasa “kegiatan kemanusiaan” pada data tersebut, menyatakan bentuk kepedulian kepada korban tsunami.

Data (3) bermakna menyatakan bentuk kepedulian dengan melakukan kegiatan kemanusiaan seperti mengarahkan relawan, mendirikan posko bantuan dan sebagainya. Sikap kepedulian yang dilakukan oleh Ma’ruf dapat memberikan hal positif dari rakyat yang terkena dampak tsunami. Hal positif tersebut ialah dukungan dari masyarakat kepada dirinya karena telah peduli dengan korban tsunami.

d. Pujian

Pujian adalah menyatakan sesuatu yang positif tentang seseorang, melahirkan kekaguman dan penghargaan kepada sesuatu yang dianggapi baik. Pada sebuah wacana, bentuk tersebut dimaksudkan untuk membuat orang yang mendengar merasakan tersanjung, memotivasi, dan membangun rasa kepercayaan orang lain kepada suatu individu maupun kelompok. Bentuk eufemisasi ini dapat dilihat pada data berikut ini.

- (4) Dahnil mengatakan permintaan maaf yang disampaikan Prabowo-Sandi itu menunjukkan sikap *rendah hati*, sehingga meminta maaf atas kesalahan kecil yang mereka lakukan. (SDC41.BC27/14.11.2018)

Data (4), Dahnil sebagai koordinator juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga menanggapi saran wakil sekretaris TKN Jokowi-Ma’ruf, agar Prabowo-Sandiaga tobat dan hijarah. Saran tersebut dilontarkan Raja Juli merespons deretan permintaan maaf yang disampaikan Prabowo maupun Sandiaga kepada publik sepanjang kampanye Pilpres 2019. Dahnil mengatakan setiap kesalahan kecil yang dilakukan, Prabowo maupun Sandi dengan rendah hati langsung memohon maaf.

Permintaan maaf Prabowo-Sandi selama kampanye Pilpres 2019 menunjukkan sikap rendah hati. Permintaan maaf Prabowo-Sandi juga mengartikan bahwa mereka hanya manusia biasa dan tidak ingin bersikap angkuh kepada masyarakat jika melakukan kesalahan. Pasangan Prabowo-Sandi sudah terhitung tiga kali meminta maaf kepada masyarakat sepanjang gelaran kampanye Pilpres. Prabowo meminta maaf sebanyak dua kali kepada masyarakat terkait kasus hoaks Ratna dan kasus tampang Boyolali, sedangkan Sandi meminta maaf terkait melangkahi makam tokoh Nahdhatul Ulama saat berziarah. Ditinjau dari aspek kebahasaan frasa “rendah hati” pada data tersebut, digunakan untuk menyatakan pujian kepada Prabowo-Sandi.



Data (4) bermakna bahwa Prabowo-Sandi merupakan panutan yang dapat menjadi contoh kepada masyarakat karena jiwa rendah hati mereka. Seorang pemimpin harus mempunyai jiwa rendah hati kepada rakyat dengan meminta maaf atas kesalahan yang dibuat. Secara tidak langsung bahwa Prabowo-Sandi merupakan tokoh yang layak menjadi pemimpin karena sikap yang rendah hatinya kepada rakyat.

e. Pemberian

Pemberian adalah sesuatu yang diberikan, sesuatu yang didapatkan dari orang lain, perbuatan memberi atau memberikan sesuatu. Pada sebuah wacana, bentuk tersebut dimaksudkan untuk membangun rasa kepercayaan orang lain dan mempengaruhi individu maupun kelompok agar mendukung salah satu capres-cawapres. Bentuk eufemisasi ini dapat dilihat pada data berikut ini.

- (5) Ia mengaku menemukan seorang ibu-ibu yang enggan memberi dukungan karena sudah menerima *pendingan ruangan* dari pihak penantang Jokowi. (SDC25.BC14/ 22.12.2018)

Data (5), blusukan yang dilakukan oleh perempuan pendukung Jokowi-Ma'ruf di Provinsi Banten sama dengan yang dilakukan saat Jokowi dan timnya di Pilgub DKI Jakarta 2012 dan Pilpres 2019. Perempuan Banten melakukan blusukan dengan pintu ke pintu untuk menjaring dukungan bagi Jokowi-Ma'ruf Amin. Hasto bercerita mengenai pengalamannya dari pintu ke pintu mengumpulkan suara bagi Jokowi. Ada warga yang tidak memberikan dukungan kepada Jokowi karena sudah diberi atau menerima AC dari kubu penantang Jokowi. Pada Pilpres 2014 silam, Jokowi kalah dari Prabowo Subianto di wilayah Banten. Jokowi hanya memperoleh 42,9 persen, sementara Prabowo memperoleh 57,1 persen. Pilpres 2019, Jokowi-Ma'ruf menargetkan 70 persen suara di wilayah Banten. Ma'ruf Amin sebagai cawapres Jokowi dan merupakan putra daerah tersebut diharapkan dapat memenangkan suara di wilayah Banten. Ditinjau dari aspek kebahasaan yakni frasa “pendingin ruangan” pada data tersebut, digunakan untuk menyatakan suatu pemberian dari pihak lain.

Data (5) bermakna bahwa alasan ibu-ibu tidak memilih Jokowi dalam Pilpres 2019 mendatang karena sudah mendukung pihak lain ditandai dengan pemberian pendingin ruangan. Di sisi lain, model yang dilakukan oleh penantang Jokowi sangat efektif untuk mendapatkan dukungan karena memberikan sesuatu kepada rakyat. Dalam pemilihan kepala daerah maupun kepala negara pemberian barang kepada rakyat untuk memperoleh dukungan sangat sering terjadi dan merupakan suatu strategi yang sangat efektif.

f. Harapan

Harapan adalah sesuatu yang dapat diharapkan, keinginan supaya menjadi kenyataan, orang yang diharapkan atau dipercaya. Pada sebuah wacana, bentuk tersebut dimaksudkan untuk membangun rasa percaya, optimis pada seseorang ataupun pada sesuatu hal di waktu yang akan datang. Bentuk eufemisasi ini dapat dilihat pada data berikut ini.

- (6) SBY *berharap* jangan ada saling ganggu dalam masa kampanye ini. (SDC8.BC5/ 21.12.2018)

Data (6), Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan keterangan pers pascapertemuannya dengan calon presiden Prabowo Subianto di Mega Kuningan. Menutup pernyataan pers, SBY berharap agar dalam masa kampanye jangan ada saling mengganggu. SBY menginginkan agar semua pihak yang terlibat dalam kontestasi Pilpres 2019 dapat berikhtiar sekuat tenaga. Menurutnya, semangat tersebutlah yang menjadi dambaan rakyat tentang pemilu yang damai dan demokratis. Sebelumnya, SBY sempat menyampaikan kekhawatirannya akan potensi penyimpangan atau kecurangan dalam pemilu, hal tersebut tentunya mencoreng nilai demokrasi. SBY dan Prabowo sepakat bahwa pemilu harus damai, jujur, dan adil.

Pernyataan SBY mengungkapkan bahwa dalam masa-masa kampanye hal seperti saling menyerang atau saling mengganggu antara kubu yang bertarung dalam Pilpres 2019 mungkin akan terjadi. Melihat suhu politik akhir-akhir ini di Indonesia semenjak mulainya digelar wacana pencalonan presiden dan wakil presiden yang rentan dengan aksi adu argumen satu sama lain. Dan pasti akan berlanjut hingga selesainya Pilpres 2019. Oleh karena itu, para elite politik seharusnya mengimbau anggotanya agar dalam masa kampanye lebih mengedepankan penjelasan tentang visi dan misi serta program yang akan dilakukan kepada masyarakat. Ditinjau dari aspek kebahasaan yakni kata “berharap” pada data tersebut, digunakan untuk menyatakan bentuk harapan SBY dalam masa kampanye.

Data (6) bermakna bahwa SBY menginginkan dalam masa kampanye tidak ada aksi yang dapat mencederaikan antara kubu satu dengan kubu lain dalam perbedaan pilihan politik. Agar pemilu presiden 2019 menjadi pemilu dambaan rakyat yang damai dan demokratis. Ungkapan tersebut tidak hanya ditujukan kepada lawan politik ataupun peserta yang terlibat dalam kontestasi Pilpres 2019, namun harapan SBY tersebut secara tidak langsung agar masyarakat juga harus mengedepankan sikap menghargai atas perbedaan pilihan politik. Oleh karena itu, aksi saling ganggu yang dapat merugikan tidak terjadi ditengah-tengah masyarakat.

g. Belas Kasihan

Belas kasihan adalah perasaan iba atau sedih melihat orang lain menderita.

Pada sebuah wacana, bentuk tersebut dimaksudkan untuk mengungkapkan rasa prihatin, kasihan dan sebagai semangat untuk seseorang. Bentuk eufemisasi ini dapat dilihat pada data berikut ini.

- (7) *“Saya tidak rela rakyat kita selalu kesulitan hidup tiap hari, tiap bulan karena saya mengerti dan saya tahu kekayaan kita sangat besar*

*saudara-saudara sekalian,”*lanjutnya (Prabowo). (SDC52.BC37/ 4.11.2018)

Data (7), cawapres nomor urut 2 yakni Prabowo merasa prihatin atas kehidupan orang lain. Pernyataan Prabowo tersebut berdasarkan keluhan kesah seorang pengusaha yang mempunyai rumah sakit bahwa pemerintah memiliki utang sebanyak Rp 100 miliar. Pengusaha tersebut merasakan selama 30 tahun menjadi pengusaha, belum pernah keadaan separah sekarang. Di sisi lain, para petani yang baru saja memanen padinya, namun bingung untuk menjual hasil panennya karena pemerintah mendatangkan impor beras dari Vietnam dan Thailand, hal serupa juga dialami oleh petani tebu. Oleh karena itu, Prabowo merasa prihatin atas kesulitan yang dihadapi oleh rakyat. Prabowo merasa kekayaan pangan di Indonesia sangat tinggi tetapi rakyat masih saja kesulitan hidupnya. Ditinjau dari aspek kebahasaan yakni kalimat interjeksi pada data tersebut, menyatakan bentuk belas kasihan Prabowo kepada rakyat.

Data (7) bermakna belas kasihan Prabowo kepada rakyat yang masih kesulitan hidup, sedangkan sumber daya alam bangsa Indonesia sangat banyak dan dapat menumbuhkan ekonomi masyarakat. Di sisi lain, Prabowo prihatin atas tunggakan utang pemerintah kepada rumah sakit sebesar Rp100 miliar. Seharusnya persoalan tersebut menjadi fokus pemerintahan, karena menyangkut kehidupan seseorang.

#### h. Imbauan

Imbauan ialah panggilan, permintaan (seruan), atau sebuah ajakan. Pada sebuah wacana, bentuk tersebut dimaksudkan untuk mengajak atau meminta orang lain untuk ikut melakukan sesuatu hal. Bentuk eufemisasi ini dapat dilihat pada data berikut ini.

- (8) “*Mari* berdemokrasi secara baik, adu gagasan, adu rekam jejak, adu program, adu visi misi,” katanya. (SDC23.BC13/ 21.10.2018)

Data (8), Jokowi dalam pidatonya pada gelaran HUT Partai Golkar sempat meminta politikus agar menghentikan politik bohong yang bisa menjerumuskan publik. Hal yang sama juga diungkapkan oleh juru bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan, menyebutkan agar semua pihak tak mudah menarik kesimpulan dari sedikitnya kejadian. Ungkapan Jokowi dan Ace tersebut merupakan respon dari pernyataan Sandiaga Uno yang sering bicara tanpa data. Baginya sikap Sandi tersebut bisa dikatakan sebagai bagian dari politik bohong. Dalam beberapa kesempatan, Sandiaga melontarkan sejumlah pernyataan, terutama terkait kondisi perekonomian yang dianggap sulit. Contohnya tempe yang semakin tipis karena bahan baku kedelai yang mahal. Kubu Prabowo-Sandi menyebut data tersebut rill dari pengakuan masyarakat. Ditinjau dari aspek kebahasaan yakni kata “*mari*” pada data tersebut, menyatakan bentuk imbauan dalam berdemokrasi.

Data (8) bermakna untuk mengajak agar dalam berdemokrasi tidak melakukan politik kebohongan dan saling sindir satu sama lain. Jokowi menginginkan dalam berdemokrasi selalu melakukan hal-hal yang positif agar

demokrasi berjalan dengan baik. Jokowi menyatakan hal tersebut dikarenakan lawan politik beliau sering melakukan politik kebohongan. Secara tidak langsung Jokowi menyinggung pihak oposisi yang kerap menyerang pihak petahana dengan informasi yang bohong. Pesta demokrasi sering terjadi sindir-menyindir satu sama lain, hal tersebut dilakukan agar menurunkan elektabilitas lawan politik dan tindakan tersebut dapat mencederai nilai demokrasi. Oleh karena itu, Jokowi mengajak agar dalam berdemokrasi diisi dengan adu gagasan, rekam jejak, program, dan visi misi.

i. Persaudaraan

Persaudaraan adalah persahabatan yang sangat karib, seperti layaknya saudara, pertalian persahabatan yang serupa dengan pertalian saudara. Pada sebuah wacana, bentuk tersebut dimaksudkan untuk membangun rasa persatuan maupun kekerabatan dan mempertahankan rasa persaudaraan yang sudah dimiliki. Bentuk eufemisasi ini dapat dilihat pada data berikut ini.

- (9) Prabowo dijadwalkan menghadiri acara *silaturahmi* dengan masyarakat dan pelaku usaha keturunan Tionghoa. (SDC13.BC7/21.12.2018)

Data (9), setelah bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pada jumat malam, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto langsung melakukan safari politik di Surabaya, Jawa Timur. Prabowo akan menemui pengusaha keturunan Tionghoa. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Jawa Timur Soepriyanto mengatakan Jawa Timur merupakan wilayah pertarungan yang sengit dalam Pilpres 2019. Provinsi tersebut pihaknya perlu menyampaikan visi dan misi Prabowo-Sandi di bidang ekonomi dengan lebih intensif. Soepriyanto mengatakan penguatan langkah kemenangan di Jawa Timur merupakan salah satu hasil pertemuan Prabowo dengan SBY kemarin. Dari hasil pertemuan itu pula, Jawa Timur akhirnya dipilih menjadi prioritas Prabowo-Sandiaga, selain Jawa Tengah. Ditinjau dari aspek kebahasaan yakni kata “*silaturahmi*” pada data tersebut, menyatakan bentuk persaudaraan.

Data (9) bermakna bahwa kekerabatan atau persaudaraan Prabowo dengan pengusaha Tionghoa dapat membantu atau mendukung dirinya dalam Pilpres 2019. Prabowo memanfaatkan acara *silaturahmi* dengan pengusaha Tionghoa untuk menyampaikan visi misi, agar mereka mengetahui hal yang ingin dicapai Prabowo jika dirinya terpilih sebagai Presiden.

j. Menyarankan

Menyarankan ialah memberi saran atau menganjurkan. Pada sebuah wacana, bentuk tersebut dimaksudkan untuk melakukan suatu tindakan agar tindakan tersebut dapat bermanfaat atau berguna kedepannya. Bentuk eufemisasi ini dapat dilihat pada data berikut ini.

- (10) “*Sebaiknya para pemimpin menyampaikan pertanyaan hal-hal yang membangun peradaban, pertanyaan-pertanyaan yang membangun*”

*persaudaraan, jangan prejudice jadi dalam proses pemilu ini,”* kata Hasto. (SDK129.BK22/ 22.12.2018)

Data (10), Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto, menanggapi ucapan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono yang meminta supaya tidak ada yang mengganggu Koalisi Adil Makmur. Menurut Hasto, alangkah baiknya jika di antara elite politik tidak saling mencurigai. Jika SBY merasa ada pihak yang mengganggu, lebih baik dilaporkan secara hukum supaya bisa diproses menurut perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil survei internal pihaknya yang ternyata juga sejalan dengan hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) antara PDIP dan Partai Demokrat tidak saling bertentangan. Untuk itu, tidak ada satu pun pihak yang boleh mengganggu partai politik yang secara sah diakui oleh undang-undang. Ke depannya, Hasto menyarankan supaya para pemimpin partai politik dapat menyampaikan pernyataan-pernyataan yang membangun, bukan justru berprasangka. Ditinjau dari aspek kebahasaan yakni kalimat pada data tersebut, menyatakan bentuk menyarankan kepada para pemimpin dalam bijaksana mengeluarkan pernyataan-pernyataan.

Data (10) bermakna bahwa Pilpres bukan untuk membuat perpecahan dengan saling curiga dan melontarkan pernyataan-pernyataan yang dapat mencederai nilai demokrasi. Hasto menginginkan agar di antara elite partai politik dapat membangun suasana politik yang baik, agar terciptanya kondisi politik yang membangun nilai persaudaraan.

#### k. Penegasan

Penegasan adalah penjelasan atau kemampuan untuk mendapatkan persepsi yang tajam untuk menilai dengan baik. Pada sebuah wacana, bentuk tersebut dimaksudkan untuk menanggapi dengan jelas keadaan yang sebenarnya terjadi atau yang dirasakan. Bentuk eufemisasi ini dapat dilihat pada data berikut ini.

- (11) “Saya ingatkan tantangan partai politik terutama tugas mengembalikan kepercayaan ke partai politik, kelurahan politik, ini kerjaan kita ke depan , dan *ini tidak terjadi kalau tokoh politik adu hoax, saling mencaci,*” kata Jokowi. (SDD72.BD9/ 21.10.2018)

Data (11), Presiden Joko Widodo bicara soal kedekatan antara tokoh politik dengan masyarakat. Jokowi mengatakan, tantangan partai politik saat ini adalah mengembalikan kepercayaan publik terhadap partai politik sendiri maka partai politik harus bekerja keras. Jokowi juga mengatakan bahwa tokoh politik jangan hanya berdiri dengan rakyat, tetapi juga harus duduk bersama melakukan karya dengan masyarakat. Jokowi yakin, Partai Golkar merupakan partai senior di kancah perpolitikan Indonesia. Partai berlambang pohon beringin itu bisa menjadi panutan bagi perpolitikan Indonesia. Ditinjau dari segi kebahasaan yakni klausa pada data tersebut, menyatakan bentuk penegasan kepada partai politik.

Data (11) bermakna menegaskan jika tokoh politik adu hoaks dan saling mencaci maki masih sering terjadi atau dilakukan secara tidak langsung mengembalikan kepercayaan publik terhadap partai politik itu tidak akan dicapai. Jokowi menginginkan agar tokoh politik sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuhkan kepercayaan pada masyarakat. Pilpres 2019 akan rentan terjadinya perbedaan pilihan politik, tetapi tugas tokoh politik agar tidak mengedepankan saling mencaci apalagi menebar hoaks. Pernyataan Jokowi tersebut dapat mempengaruhi para tokoh politik agar dalam mengumpulkan dukungan tidak menggunakan cara yang dapat mencederai nilai demokrasi sehingga kepercayaan publik kepada partai politik dapat bernilai positif.

## 2. Bentuk dan Makna Sensorisasi dalam Wacana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019

### a. Kriminal

Kriminal adalah berkaitan dengan kejahatan (pelanggaran hukum) yang dapat dihukum menurut undang-undang pidana. Bentuk sensorisasi ini dapat dilihat pada data berikut ini.

(12) *Melalui akun-akun tersebut, JD menyebarkan berita bohong, pornografi, dan ujaran kebencian berbasis suku, agama, ras, dan golongan, salah satunya adalah menyebutkan bahwa Jokowi PKI. (SDK143.BK36/ 24.11.2018)*

Data (12), Polisi menangkap JD, orang yang diduga menyebarkan fitnah Presiden Joko Widodo adalah anggota Partai Komunis Indonesia (PKI). Merespon hal tersebut, Presiden Jokowi mengatakan bahwa proses hukum bagi JD itu adalah bentuk “tabok.” Sebelumnya, Jokowi mengungkapkan keinginan menabok orang yang menudingnya anggota PKI. Presiden Jokowi pun mengingatkan bagi masyarakat, khususnya pengguna media sosial untuk berhati-hati. Jangan sekali-kali memuat postingan kabar bohong, fitnah dan sebagainya yang bisa merugikan orang lain. JD, pemilik akun Instagram yang menyebarkan hoaks, pornografi, dan ujaran kebencian, diamankan oleh Direktorat Tindak Siber Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Ditinjau dari aspek kebahasaan yakni kalimat deklaratif pada data tersebut, menyatakan bentuk kriminal yang dilakukan oleh JD.

Data (12) bermakna menjelaskan tindakan kriminal yang dilakukan oleh JD. JD adalah admin akun media sosial antara lain *suararakyat23*, *suararakyat23id*, *suararakyat23ind*, *sr23.official*, *sr23official*, *sr23\_official*, *suararakyat23\_ind*, dan *srct\_dta*. Akun-akun tersebut, memuat postingan kabar bohong, fitnah, dan sebagainya yang bisa merugikan orang lain. Selain itu JD juga menyebut bahwa Jokowi adalah PKI. JD memosting foto Jokowi yang sedang berpose hormat dengan menambahkan lambing palu arit dan tulisan “Jokowi adalah seorang komunis.” Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, akun yang dikendalikan JD ini telah mengunggah 1.186 konten dengan 843 meme di antaranya dibuat JD.

b. Ketidakpantasan

Ketidakpantasan ialah tidak patut, tidak layak, tidak sesuai, dan tidak sepadan. Pada sebuah wacana, bentuk tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan suatu pernyataan ataupun tindakan yang tidak patut untuk dilakukan. Bentuk sensorisasi ini dapat dilihat pada data berikut ini.

- (13) *“Ungkapan jewer-menjewer saya pikir tidak pantas untuk disampaikan,” ujar Hasto. (SDC58.BC43/ 21 11 2018)*

Data (13), Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto menilai pernyataan Amin Rais yang akan menjewer Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir yang membebaskan pilihan warga Muhammadiyah di Pilpres 2019, tidak pantas. Menurut Hasto, Haedar merupakan sosok pemimpin Muhammadiyah yang bijaksana dan harus dihormati. Kata-kata menjewer tidak tepat dialamatkan kepada Haedar. Hasto mengatakan seharusnya Amien menghormati imbauan Haedar, karena jika dilihat dari sudut pandang asas pemilu sudah tepat. Secara terpisah, Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Najih Prasetyo mengatakan khittah Muhammadiyah yaitu tidak terikat dan menjaga jarak yang sama dengan semua partai politik. Ditinjau dari aspek kebahasaan yakni kalimat pengingkaran pada data tersebut, menyatakan bentuk ketidakpantasan terhadap ungkapan Amin Rais.

Data (13) bermakna bahwa Amin Rais sebagai salah satu tokoh politik maupun tokoh masyarakat tidak sepatutnya melontarkan ucapan tersebut yang ditujukan kepada Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir. Seharusnya Amin Rais menghargai keputusan atau pernyataan Haedar Nasir yang menginginkan netral dan tidak memihak kepada salah satu calon presiden. Amin Rais harus memberikan contoh yang baik kepada orang lain dan tidak mengeluarkan pernyataan yang dapat merugikan.

c. Menuduh

Menuduh adalah ialah menunjuk dan mengatakan bahwa seseorang berbuat kurang baik atau mengatakan seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Bentuk sensorisasi ini dapat dilihat pada data berikut ini.

- (14) Bahkan, publik yang tergolong anti Jokowi hingga saat ini masih berusaha untuk mengungkit kekalahan Prabowo Subianto di Pilpres 2014, dan menarasikan kemenangan Jokowi sebagai suatu *kecurangan*. (SDK125.BK20/ 21.10.2018)

Data (14), empat tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo masih dibayang-bayangi polarisasi yang terjadi di tengah masyarakat. Publik seolah

terbagi menjadi dua kubu, pendukung Jokowi dan anti Jokowi. Melihat hal tersebut, pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Adi Prayitno menilai ada fenomena dalam masyarakat yang disebut dengan bebal demokrasi. Adi mengatakan banyak orang yang tidak rasional dan objektif dalam berpolitik. Sentimen-sentimen negatif dituduhkan kepada pemerintah, bahkan dibumbui dengan berita bohong dan hoaks yang cukup ekstrim. Masyarakat yang bebal politik juga cenderung menutup mata dari kebaikan yang telah dicapai pemerintah, serta mengedepankan emosi yang berdasarkan pada rasa tidak suka. Ditinjau dari aspek kebahasaan yakni kata “kecurangan” pada data tersebut, menyatakan tuduhan kecurangan yang dilakukan oleh kubu Jokowi saat Pilpres 2014.

Data (14) bermakna tuduhan kepada kemenangan Jokowi saat Pilpres 2014 merupakan suatu bentuk kecurangan. Tuduhan tersebut dinarasikan oleh publik yang tergolong anti Jokowi yang selalu berusaha mengungkit kekalahan Prabowo saat Pilpres 2014. Tuduhan kecurangan yang terjadi saat Pilpres 2014 karena beredarnya video warga yang memperlihatkan tindakan yang menguntungkan salah satu kubu yang berkompetensi di Pilpres 2014. Kubu anti Jokowi yang masih mengungkit kecurangan tersebut dapat menjadi senjata untuk melawan petahana di Pilpres 2019, dengan narasi kemenangan Jokowi sebagai suatu kecurangan dan diperkuat dengan beredarnya video kecurangan tersebut dapat mempengaruhi masyarakat dalam menentukan pilihannya saat Pilpres 2019.

#### d. Ancaman

Ancaman ialah sesuatu yang diancamkan atau perbuatan mengancam. Pada sebuah wacana, bentuk tersebut dimaksudkan untuk membangun kepercayaan publik dengan menggunakan suatu peringatan. Bentuk sensorisasi ini dapat dilihat pada data berikut ini.

- (15) Bila masyarakat hanya terbuai dengan tampilan luar si calon pemimpin dan janji-janji saat kampanye, tanpa melihat lebih dalam jati diri mereka serta kompetensi dirinya, maka *politik genduruwo* akan mengancam. (SDK103.BK1/ 10.11.2018)

Data (15), saat menjelang pemilihan umum 2014, Sindhunata menulis artikel dengan judul “Awas, Politik Genderuwo” di *Harian Kompas*. Melalui tulisannya, wartawan senior sekaligus pemangku majalah Basis tersebut, mengajak masyarakat untuk melihat secara cermat dan kritis calon pemimpin yang menjagokan diri menjadi pemimpin atau pejabat. Dalam artikelnya, Sindhunata menjelaskan secara gamblang “bahaya” dari calon pemimpin yang hanya memburu kekuasaan dan tidak mempertimbangkan kemampuan mereka untuk menanggung beban tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Sementara itu, Presiden Jokowi akhir-akhir ini memunculkan kembali istilah tersebut. Jokowi menjelaskan perilaku politik yang tidak beretika baik dan hanya menakut-nakuti rakyat adalah politik genderuwo. Ditinjau dari aspek kebahasaan yakni frasa nomina “politik genderuwo” pada data tersebut, menyatakan bentuk ancaman jika tidak selektif dalam memilih calon kepala negara.



Data (15) bermakna masyarakat harus mewaspadaai dan harus selektif dalam memilih calon pemimpin. Pada dasarnya tokoh politik yang berkompetensi dalam Pilpres 2019 kerap menunjukkan sikap yang merakyat dan memberikan janji-janji yang pro rakyat. Sikap merakyat yang ditunjukkan seorang calon pemimpin dapat mempengaruhi masyarakat dengan mudah, padahal belum tentu calon pemimpin tersebut merakyat. Istilah politik genderuwo pertama kali diungkapkan oleh Jokowi yang menjelaskan tentang politik yang tidak beretika baik dan hanya menakut-nakuti rakyat. Tetapi, hal terpenting ialah masyarakat harus cermat dan kritis kepada calon pemimpin yang berkompetensi dalam Pilpres 2019. Masyarakat harus melihat lebih dalam jati diri mereka, sehingga tidak terjebak oleh gimik yang dilakukan calon pemimpin. Politik genderuwo bukan hanya sekadar politik yang menakuti rakyat, tetapi politik yang juga mengelabui rakyat untuk kepentingan kekuasaan yang ingin dicapai.

e. Sindiran

Sindiran ialah perkataan yang bermaksud menyindir orang; celaan (ejekan dan sebagainya) yang tidak langsung. Bentuk sensorisasi ini dapat dilihat pada data berikut ini.

- (16) *“Bagi kami, genderuwo ekonomi tercermin dari pernyataan para politisi yang selalu menakut-nakuti rakyat dengan narasi pesimistis dan ketidakpastian ekonomi yang tidak sesuai dengan fakta objektif yang dihadapi masyarakat,”* kata juru bicara TKN Jokowi-Ma’ruf, Ace Hasan Syadzily. (SDD81.BD16/ 13.11.2018)

Data (16), pernyataan presiden Joko Widodo tentang “politik genderuwo” ditanggapi cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno dengan menyebut masyarakat harus waspada terhadap “genderuwo ekonomi.” Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin punya tafsir sendiri mengenai genderuwo ekonomi versi Sandi. Ace memberi contoh soal narasi pesimistis tersebut. Dia mengungkit masalah tempe hingga harga makanan di negara lain. Bagi Ace, menyampaikan pandangan politik yang berbeda dalam melihat situasi saat ini merupakan hal yang lumrah dan menjadi bagian dari proses demokrasi. Sebelumnya diberitakan, Sandi menyebut genderuwo ekonomi sangat berbahaya. Sandi meminta semua pihak waspada. Genderuwo ekonomi, kata Sandi membuat harga-harga melangit hingga lapangan pekerjaan semakin sulit didapatkan. Ditinjau dari aspek kebahasaan yakni kalimat deklaratif pada data tersebut, menyatakan sindiran kepada para politisi dengan menakut-nakuti masyarakat.

Data (16) bermakna bahwa Sandiaga yang menggunakan kondisi ekonomi untuk menakut-nakuti masyarakat. Menurut Ace, genderuwo ekonomi ialah politisi yang kerap menggunakan narasi pesimistis dan ketidakpastian ekonomi, hal tersebut merupakan tercermin kepada Sandiaga yang merupakan cawapres nomor urut 02. Sindiran Ace yang ditujukan kepada Sandiaga tersebut merupakan respon atas pernyataan Sandiaga tentang genderuwo ekonomi. Sandiaga dianggap menciptakan ketakutan ekonomi yang membayakan bagi rakyat. Oleh karena itu,

sebaiknya para politisi janganlah menggunakan narasi yang negatif hanya semata-mata untuk kepentingan politik jangka pendek dan mengedepankan narasi positif.

f. Kecurigaan

Kecurigaan ialah perihal curiga, ketidakpercayaan, rasa curiga. Pada sebuah wacana, bentuk tersebut ditunjukkan pada suatu tindakan yang dapat melanggar hukum atau suatu tindakan yang dapat merugikan pihak lain. Bentuk sensorisasi ini dapat dilihat pada data berikut ini.

- (17) TKN Jokowi-Ma'ruf *curiga* dengan aksi bagi-bagi buku Prabowo Subianto. (SDD82.BD17/ 1.11.2018)

Data (17), Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Raja Juli Antoni yang merupakan Sekjen PSI, mencurigai aksi Prabowo yang membagikan buku kepada masyarakat. Raja Juli mengatakan kenapa bisa masyarakat Ponorogo saat itu berebutan mengambil buku yang diberikan tim Prabowo. Ia meminta Bawaslu menyelidiki hal tersebut. Selain itu, ia juga menyoroti tindakan Prabowo yang marah saat masyarakat berebut buku. Antoni menyebut hal tersebut menunjukkan perilaku Prabowo yang sesungguhnya. Ditinjau dari aspek kebahasaan kata "curiga" pada data tersebut, menyatakan kecurigaan TKN kepada Prabowo.

Data (17) bermakna bahwa menunjukkan adanya rasa curiga Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin dengan adanya aksi bagi-bagi buku Prabowo. Aksi bagi-bagi buku oleh Prabowo dilakukan saat menghadiri safari kampanye di wilayah Ponorogo. TKN Jokowi-Ma'ruf menilai aksi tersebut rentan sebagai *money politics*. Undang-undang pemilu menegaskan bahwa tidak diperbolehkan memberi uang atau barang kepada seseorang untuk mempengaruhi para pemilih. TKN Jokowi-Ma'ruf ingin mempertanyakan aksi Prabowo tersebut apakah termasuk *money politics*.

g. Kekecewaan

Kekecewaan ialah perasaan kecil hati, tidak puas (karena tidak terkabul keinginannya, harapannya, dan sebagainya), tidak senang, dan gagal dalam usahanya. Bentuk sensorisasi ini dapat dilihat pada data berikut ini.

- (18) "*Kita seperti tidak di Indonesia lagi, di mana setiap orang masing-masing saling memaki, saling mengejek, saling bertentangan dan itu terbuka secara umum,*" tutur pria yang akrab disapa Gus Irfan. (SDC43.BC28/ 1.11.2018)

Data (18), Irfan Yusuf Hasyim, cucu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) Hasyim Asy'ari, mengatakan kondisi Indonesia sudah berbeda dalam empat tahun

terakhir era pemerintahan Jokowi-Widodo-Jusuf Kalla. Hal tersebut menjadi alasan Irfan bergabung dan menjadi Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019. Hal lain yang menurutnya Indonesia berbeda dalam empat tahun ke belakang, yakni seputar moral dan kondisi ekonomi yang tak kunjung membaik. Menurutnya, banyak masyarakat khususnya di pedesaan terjepit dengan kondisi ekonomi dalam empat tahun terakhir. Gus Irfan mengatakan hal tersebut berdasarkan apa yang dilihat dan didengarnya dari para petani tebu di kampung halamannya. Serta Gus Irfan menilai masa-masa kampanye atau menjelang Pilpres 2019 masyarakat saling memfitnah ataupun mengejek, hal tersebut bukanlah merupakan cerminan bangsa Indonesia. Ditinjau dari aspek kebahasaan yakni kalimat interjeksi pada data tersebut, menyatakan bentuk kekecewaan Gus Irfan terhadap Indonesia saat ini.

Data (18) bermakna perubahan kondisi politik di Indonesia kerap mempertontonkan sikap yang kurang baik dalam menyikapi perbedaan politik. Gus Irfan menilai sikap saling memaki, mengejek, dan saling bertentangan bukanlah cerminan dari bangsa Indonesia. Tokoh politik yang berkompetisi dalam Pilpres 2019, harus memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Jiwa mempersatukan harus ada pada tokoh politik, sehingga dalam perbedaan pilihan politik tetap saling menghargai satu sama lain. Secara tidak langsung, Gus Irfan menginginkan agar sikap saling menghormati dan menjaga persatuan harus tetap dipelihara dalam perbedaan pilihan politik agar tidak terjadi perpecahan dan konflik.

#### h. Asusila

Asusila ialah perihal tidak susila (tidak baik budi bahasanya, tidak beradab, tidak sopan), tidak baik tingkah lakunya. Pada sebuah wacana, bentuk tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan suatu pernyataan ataupun tindakan yang merupakan bentuk asusila. Bentuk sensorisasi ini dapat dilihat pada data berikut ini.

- (19) *“Netral itu setan bisu dalam perspektif tauhid, dia setan, tapi bisu, tapi kan tetap setan, ya saya gak bilang dia (SBY) setan,”* kata Eggi. (SDC60.BC45/ 11.11.2018)

Data (19), Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Eggi Sudjana tidak setuju dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang menyebut soal politik SARA menguat sejak pilgub DKI 2017. Eggi justru mengatakan kalau Presiden Indonesia ke-6 tersebut sering melakukan aksi politik benci di setiap langkah politik yang diambil karena tidak menentukan arah dukunga dan menyebut dirinya netral. Eggi menyebut sikap netral yang seringkali diambil SBY saat berpolitik seperti setan bisu. Dikatakan Eggi, dalam berpolitik dan dalam hidup sebagai manusia tentu diperlukan identitas. Maka SBY pun menurut Eggi harusnya sudah jauh-jauh hari menunjukkan arah politiknya. Jika SBY menyebut adanya politik SARA atau politik identitas, hal tersebut soal perspektif. Ditinjau dari aspek kebahasaan yakni kalimat interjeksi pada data tersebut, menyatakan bentuk asusila.

Data (19) bermakna ditujukan pada cara berpolitik SBY yang tidak menentukan arah dukungan. Sikap netral SBY dinilai oleh Eggi sebagai setan. Setan dalam KBBI diartikan sebagai roh jahat, menyatakan kemarahan, dan orang yang buruk. Pernyataan Eggi yang tidak pantas tersebut didasari karena SBY menyebut soal politik SARA menguat sejak pilgub DKI 2017 dan sikap menentukan arah politik SBY yang dinilai netral atau belum menentukan arah politiknya. Selain itu SBY juga pernah mengatakan bahwa politik sekarang telah berubah, semakin mengemukanya politik identitas atau SARA, dan politik yang sangat dipengaruhi ideologi. Perubahan politik tersebutlah yang membuat SBY harus berhati-hati dalam mengambil sikap atau arah dukungannya. Di sisi lain, Eggi menginginkan agar SBY menunjukkan identitas berpolitiknya dalam hal menentukan apakah ingin mendukung Prabowo atau mendukung Jokowi.

i. Pelanggaran

Pelanggaran ialah perbuatan (perkara) melanggar, tindak pidana yang lebih ringan daripada kejahatan. Pada sebuah wacana, bentuk tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan dugaan tindakan atau perbuatan yang melanggar aturan-aturan dalam pemilu. Bentuk sensorisasi ini dapat dilihat pada data berikut ini.

(20) *Kades Sampangagung, Kutorejo, Mojokerto Suhartono ditetapkan sebagai tersangka pidana pemilu lantaran terlibat kampanye Cawapres Sandiaga Uno.* (SDD100.BD31/ 30 11 2018)

Data (20), Kades Sampangagung yaitu Suhartono ditetapkan sebagai tersangka pidana pemilu. Kades berpenampilan nyentrik ini terang-terangan menyatakan dukungannya untuk pasangan Prabowo-Sandiaga. Hal itu dikatakan Suhartono melalui video yang diunggah akun *youtube* Islam Peace 212. Dia menilai status tersangka dirinya dalam kasus pidana pemilu merupakan bukti kezaliman pemerintahan. Jika kasus yang menjerat dirinya terus berlanjut, Kades yang akrab disapa Nono berpendapat pemerintahan saat ini perlu diganti dengan pemimpin yang baru. Menurut dia, pasangan capres dan cawapres nomor 02 akan membawa perubahan bagi Indonesia. Suhartono diketahui mengajak kepala desa di seluruh Indonesia untuk berani menentukan pilihan politik dengan mendukung Prabowo-Sandiaga. Dia juga menggalang massa untuk menyambut Sandiaga, dan mengeluarkan dana untuk kegiatan tersebut. Ditinjau dari aspek kebahasaan yakni kalimat berita pada data tersebut, menyatakan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Kades Sampangagung.

Data (20) bermakna bahwa Kades Suhartono dinilai menguntungkan salah satu calon di Pilpres 2019. Tindak pidana pemilu yang dilakukan Suhartono dilakukan secara terang-terangan. Tersangka menggalang ibu-ibu di desanya untuk menyambut Sandiaga Uno. Jumlah yang dikerahkan mencapai 50 orang dan menghabiskan Rp 20 juta untuk memberi uang lelah kepada ibu-ibu yang bersedia ikut menyambut Sandiaga. Pemasangan spanduk dan banner berisi dukungan untuk Sandiaga. Sebagai Kades harusnya netral selama masa kampanye Pilpres 2019.

### 3. Relevansi dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia

Kompetensi dasar 3.6 khususnya pada kelas XII di semester ganjil, yaitu “menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial”. Pada kompetensi dasar tersebut, sangat jelas menunjukkan adanya aktivitas siswa yang dapat diperlihatkan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pencapaian yang diinginkan dalam proses pembelajaran tersebut, yakni siswa dapat menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Menganalisis struktur teks editorial, siswa menentukan struktur yang menyusun teks editorial. Terdapat tiga struktur yaitu pernyataan pendapat (tesis), argumentasi, dan pernyataan/penegasan ulang pendapat.

Adapun teks yang sesuai untuk menganalisis struktur teks editorial ialah pada teks yang berjudul “Ma’ruf Amin: ada yang bilang Kiai Ma’ruf Hanya alat saja, ini isu kejam.” Pada teks tersebut, terdapat struktur 1) pernyataan pendapat (tesis), 2) argumentasi, dan 3) pernyataan/ penegasan ulang pendapat. Oleh karena itu, dapat menjadi model atau sebagai bahan ajar dalam materi teks editorial tingkat SMA kelas XII.

Selanjutnya, menganalisis kebahasaan teks editorial. Siswa dapat menganalisis teks editorial dengan merujuk pada kekerasan simbolik yaitu eufemisasi dan sensorisasi. Hal tersebut dilakukan agar siswa dapat mengetahui bentuk dalam teks editorial tersebut apakah berupa eufemisasi atau sensorisasi, untuk menganalisis kebahasaan teks editorial meliputi adverbial, konjungsi, verba material, verba relasional, dan verba mental. Setelah itu, siswa dapat melanjutkan dengan menganalisis menggunakan eufemisasi dan sensorisasi.

Unsur kebahasaan adverbial ialah bahasa yang dapat mengekspresikan sikap eksposisi, agar dapat meyakinkan pembaca yang biasa dipertegas dengan kata seperti selalu, biasanya, sering, jarang, dan lain-lainnya. Dalam hasil penelitian, kata *selalu* ditemukan pada data (81) “Bagi kami, genderowo ekonomi tercermin dari pernyataan para politisi yang *selalu* menakut-nakuti rakyat dengan narasi pesimistis dan ketidakpastian ekonomi yang tidak sesuai dengan fakta objektif yang dihadapi masyarakat,” kata juru bicara TKN Jokowi-Ma’ruf, Ace Hasan Syadzily. Kata *sering* yang menjadi penegasan adverbial ditemukan dalam bentuk sensorisasi yaitu pada data (136) “Segala jurus dipakai untuk memperoleh simpati rakyat, tetapi yang enggak baik *sering* menyerang lawan politik dengan cara-cara yang tidak beradab juga, tidak ada tata kramanya, tambah Jokowi.” Unsur kebahasaan konjungsi yang menjadi penegas kata *bahkan* ditemukan dalam bentuk eufemisasi yaitu pada data (111) “Bahwa yang menikmati kekayaan di Indonesia adalah kurang dari 1 persen bangsa Indonesia dan yang 99 persen mengalami hidup pas-pasan *bahkan* bisa dikatakan sangat sulit.”

Unsur kebahasaan verba material yang menunjukkan aktivitas fisik yang dapat dilihat secara nyata, ditemukan dalam bentuk eufemisasi yaitu pada data (66) “Prabowo memberikan 1.000 buku kepada jemaah.” Unsur kebahasaan verba relasional menekankan pada verba atau kata kerja yang berfungsi sebagai penghubung antara subjek dan pelengkap, ditemukan dalam bentuk eufemisasi yaitu pada data (77) “Gerindra menilai dana itu *merupakan* janji manis menjelang Pilpres 2019.” Unsur kebahasaan verba mental yang menerangkan persepsi atau

afeksi, ditemukan dalam bentuk eufemisasi yaitu pada data (149) “Saya ingin menyampaikan dukacita yang mendalam kepada korban.”

## B. Pembahasan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada deskripsi hasil penelitian yang telah dilakukan, berikut ini disajikan pembahasan mengenai hasil penelitian tersebut, yang meliputi bentuk eufemisasi dan bentuk sensorisasi.

### 1. Bentuk Eufemisasi

Bentuk eufemisasi sesungguhnya merupakan elemen dalam teori kekerasan simbolik yang dipopulerkan oleh Pierre Bourdieu. Bourdieu mendefinisikan eufemisasi sebagai elemen kekerasan simbolik yang tidak tampak, bekerja secara halus, tidak dapat dikenali, dan berlangsung di alam bawah sadar (Bourdieu, 1980:219). Bentuk-bentuk eufemisasi yang dimaksudkan berupa kepercayaan, kewajiban, kesetiaan, sopan santun, pemberian, pahala, belas kasihan. Mekanisme yang ditempuh dalam mempraktikkan bentuk-bentuk tersebut dapat melalui mekanisme tersembunyi, halus, masif, dan bawah sadar.

Bentuk eufemisasi sering dipraktikkan dalam memuat berita pada media massa melalui pemakaian bahasa. Tujuan dari pemakaian eufemisasi untuk mempertahankan kekuasaan, baik pihak media maupun pihak atau kelompok yang terlibat dalam wacana yang diberitakan. Melalui wacana Pilpres 2019, media massa ataupun kelompok-kelompok tertentu ingin mempertahankan kekuasaan. Selain itu, ideologi yang mereka yakini ingin mereka tawarkan. Akan tetapi, hal tersebut dilakukan melalui beberapa strategi sehingga dapat diterima serta dirasakan oleh khalayak (pembaca) sebagai sebuah hal yang wajar dan bukan merupakan paksaan. Hal tersebut terlihat pada penggunaan bahasa yang dipilih dalam sebuah wacana, khususnya yang terkait dengan wacana pemilu presiden dan wakil presiden 2019.

Melalui penelitian yang telah dilakukan terhadap media daring *CNN Indonesia*, *Detik.com*, dan *Kompas.com* mengenai pemberitaan wacana Pilpres 2019, peneliti menemukan sebelas bentuk eufemisasi, antara lain: 1) kepercayaan, 2) kewajiban, 3) kepedulian, 4) pujian, 5) pemberian, 6) harapan, 7) belas kasihan, 8) imbauan, 9) persaudaraan, 10) menyarankan, dan 11) penegasan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, khususnya bentuk eufemisasi dapat dinyatakan ada beberapa bentuk eufemisasi yang ditemukan dalam penelitian dan tidak disebutkan oleh Bourdieu dalam teorinya. Bentuk eufemisasi yang ditemukan, antara lain; kepercayaan, kewajiban, kepedulian, pujian, pemberian, belas kasihan, harapan, imbauan, persaudaraan, menyarankan, dan penegasan. Meski demikian, ada pula beberapa bentuk eufemisasi dalam teori Bourdieu yang tidak ditemukan dalam penelitian ini. Bentuk eufemisasi yang dimaksud, antara lain; kesetiaan, sopan santun, hutang, dan pahala.

Penelitian yang dilakukan oleh Mangera dan Simega (2017) menggunakan teori Bourdieu menemukan sembilan bentuk eufemisasi yakni perintah, kewajiban, kepercayaan, belas kasihan, kegunaan, sopan santun, perjanjian, penegasan, dan larangan. Terdapat beberapa bentuk yang juga disebut dalam penelitian ini. Bentuk eufemisasi tersebut ialah kepercayaan, kewajiban, belas kasihan, dan penegasan. Bentuk eufemisasi yang berbeda dari temuan Elisabet

dan Berthin dengan penelitian ini ialah perintah, kegunaan, sopan santun, perjanjian, dan larangan. Penelitian ini menemukan antara lain; kepedulian, pujian, pemberian, harapan, imbauan, persaudaraan, dan menyarankan.

Berdasarkan pemaparan mengenai hasil yang diperoleh dalam penelitian yang telah dilakukan, dapat dinyatakan bahwa bentuk eufemisasi yang diungkapkan Bourdieu dalam teorinya memiliki perbedaan dengan bentuk eufemisasi yang diperoleh penelitian ini. Akan tetapi, hal tersebut bukanlah sebuah hal yang kontras atau bertentangan, sebab dalam teori Bourdieu memang tidak membatasi munculnya bentuk eufemisasi yang lain, terlebih lagi pada objek kajian yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini memperluas penelitian terdahulu dengan menemukan bentuk baru yaitu kepedulian, pujian, harapan, imbauan, persaudaraan, dan menyarankan.

## 2. Bentuk Sensorisasi

Bourdieu mendefinisikan sensorisasi sebagai sebuah proses yang menjadikan kekerasan simbolik tampak sebagai bentuk dari pelestarian semua bentuk nilai yang dianggap sebagai moral kehormatan yang dipertentangkan dengan moral rendah (Bourdieu, 1980:219). Dalam penelitian ini, peneliti menemukan beberapa bentuk sensorisasi dalam wacana pemilu presiden dan wakil presiden 2019. Bentuk-bentuk yang dimaksudkan, yakni antara lain: 1) kriminal, 2) ketidakpantasan, 3) kekecewaan, 4) menuduh, 5) ancaman, 6) sindiran, 7) kecurigaan, 8) asusila, dan 9) pelanggaran.

Hasil penelitian yang diperoleh, menunjukkan bahwa bentuk sensorisasi berupa kriminal, ketidakpantasan, menuduh, ancaman, sindiran, kecurigaan, kekecewaan, asusila, dan pelanggaran menggunakan mekanisme moral rendah. Mekanisme moral rendah pada elemen sensorisasi menonjolkan sikap, tindakan, dan pernyataan yang memuat nilai-nilai yang sifatnya negatif, sedangkan mekanisme moral kehormatan tidak ditemukan dalam penelitian ini. Moral kehormatan menonjolkan sikap atau tindakan yang bernilai positif dalam pandangan khalayak.

Pemaparan hasil yang telah diperoleh dalam penelitian yang telah dilakukan, bentuk-bentuk sensorisasi yang ditemukan dalam penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan bentuk sensorisasi yang telah dikemukakan Bourdieu dalam teori kekerasan simboliknya. Akan tetapi, mesti dipahami bahwa pada dasarnya Bourdieu tidak membatasi adanya bentuk sensorisasi lain yang dapat muncul dalam sebuah penelitian. Penelitian ini ditemukan sebanyak sembilan bentuk sensorisasi. Selain itu, tiga di antara sembilan bentuk sensorisasi yang ditemukan Bourdieu juga ditemukan pada penelitian ini yaitu, bentuk kriminal, ketidakpantasan, dan asusila.

Selanjutnya, perbedaan yang ditemukan dalam penelitian ini terdapat enam bentuk sensorisasi, namun tidak dikemukakan Bourdieu dalam teorinya. Bentuk tersebut yaitu; menuduh, ancaman, sindiran, kecurigaan, kekecewaan dan pelanggaran. Akan tetapi, ada bentuk yang dikemukakan oleh Bourdieu namun tidak ditemukan dalam penelitian ini, yaitu kekerasan dan kerakusan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ulfa (2013) menggunakan teori Bourdieu menemukan empat bentuk sensorisasi yakni pemarjinalan, ancaman, paksaan, dan

kekecewaan. Terdapat beberapa bentuk yang juga disebut dalam penelitian ini. Bentuk sensorisasi tersebut ialah ancaman dan kekecewaan. Bentuk sensorisasi yang berbeda dari temuan Ulfa dengan penelitian ini ialah pemarkisan dan paksaan, sedangkan penelitian ini menemukan antara lain; kriminal, ketidakpantasan, menuduh, sindiran, kecurigaan, asusila, dan pelanggaran.

Berdasarkan pemaparan mengenai hasil yang diperoleh dalam penelitian yang telah dilakukan, dapat dinyatakan bahwa bentuk sensorisasi yang diungkapkan Bourdieu dalam teorinya maupun dari penelitian terdahulu memiliki perbedaan dengan bentuk sensorisasi yang diperoleh penelitian ini. Akan tetapi, hal tersebut bukanlah sebuah hal yang kontras atau bertentangan, sebab dalam teori Bourdieu memang tidak membatasi munculnya bentuk sensorisasi yang lain, terlebih lagi pada objek kajian yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini memperluas penelitian terdahulu dengan menemukan bentuk baru yaitu menuduh, sindiran, kecurigaan, dan pelanggaran.

Pada aspek kebahasaan, penelitian yang dilakukan oleh Jufri (2015) ditemukan modalitas, kata adjektiva, kata nomina, kosakata asing, kosakata bahasa daerah, dan metafora. Penelitian ini ditemukan kosakata asing, kata nomina, kata adjektiva, dan kata verba. Pada representasi pilihan frasa, penelitian yang dilakukan oleh Jufri ditemukan frasa nomina, frasa verba, dan frasa partikel adverbial. Penelitian ini ditemukan frasa nomina, frasa verba, dan frasa adjektiva. Pada representasi pilihan kalimat, penelitian yang dilakukan oleh Jufri ditemukan kalimat pasif, kalimat deklaratif, kalimat negatif, kalimat superlatif, kalimat inversi, kalimat pertanyaan, kalimat ajakan, dan kalimat larangan. Penelitian ini ditemukan kalimat deklaratif, kalimat harapan, kalimat pengingkaran, kalimat ajakan, kalimat interjeksi, kalimat tanya, dan kalimat larangan.

Implementasi temuan dalam penelitian ini dapat menjadi model atau bahan acuan untuk menganalisis teks editorial dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMA kelas XII. Kompetensi dasar yang menjadi relevansi dalam penelitian ini ialah kompetensi dasar 3.6 yakni menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Kebahasaan teks editorial yaitu adverbial, konjungsi, dan verba. Unsur kebahasaan adverbial dalam penelitian ini ditemukan kata selalu dan sering. Unsur kebahasaan konjungsi ditemukan kata bahkan, sedangkan unsur kebahasaan verba ditemukan verba material, verba mental, dan verba relasional. Oleh karena itu, berdasarkan temuan aspek kebahasaan teks editorial dalam analisis elemen eufemisasi dan elemen sensorisasi dapat diterapkan dalam menganalisis teks editorial.

## V. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa terdapat bentuk kekerasan simbolik ditemukan di dalam wacana pemilu presiden dan wakil presiden 2019 yang dimuat di media massa khususnya media daring, dalam hal ini *CNN Indonesia.com*, *Detik.com*, dan *Kompas.com*. Bentuk kekerasan simbolik yang dimaksudkan, yakni bentuk eufemisasi dan sensorisasi serta relevansinya dalam pembelajaran bahasa Indonesia.

1. Bentuk eufemisasi yang ditemukan dalam wacana pemilu presiden dan wakil presiden 2019 terdiri atas sebelas bentuk, yaitu: kepercayaan, kewajiban,



- kepedulian, pujian, pemberian, harapan, belas kasihan, imbauan, persaudaraan, menyarankan, dan penegasan. Pemaknaan setiap bentuk pada elemen eufemisasi yang telah terurai pada bab empat untuk mengetahui maksud dan tujuan dari penggunaan bentuk yang ditemukan.
2. Bentuk sensorisasi yang ditemukan dalam penelitian ini terdiri atas sembilan bentuk, yaitu: kriminal, ketidakpantasan, menuduh, ancaman, sindiran, kecurigaan, kekecewaan, asusila, dan pelanggaran. Pemaknaan setiap bentuk pada elemen sensorisasi yang telah terurai pada bab empat untuk mengetahui maksud dan tujuan dari penggunaan bentuk yang ditemukan.
  3. Relevansi terhadap pembelajaran bahasa Indonesia dapat dimanfaatkan sebagai bahan ajar khususnya pada pembahasan mengenai eufemisasi dan sensorisasi, dengan harapan dapat memperkaya referensi atau bahan pembelajaran bahasa Indonesia khususnya pada materi teks editorial sehingga siswa memiliki pemahaman yang luas mengenai kekerasan simbolik.

### **Daftar Pustaka**

- Basit, Abdul. 2007. Relasi Antara Ideologi dengan Media Massa. *Jurnal Komunika*, No.2, Juli-Desember 2007.
- Bourdieu, Pierre. 1980. *Le Sens Pratique*, Paris: Les Editions Minuit
- Darma, Yoce Aliah. 2009. *Analisis Wacana Kritis*. Bandung: Yrama Widya.
- Eriyanto. 2003. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LkiS.
- Fashri, Fauzi. 2014. *Pierre Bourdieu Menyingkap Kuasa Simbol*. Yogyakarta: Jalasutra
- Jorgensen, Marianne W dan Philips, Louise J. 2010. *Analisis Wacana: Teori dan Metode*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Jufri, J.. 2008. *Analisis Wacana Kritis*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar
- Jufri, J., & Tolla, Achmad. 2015. Struktur Makna Simbolik dalam Wacana Politik/Presiden Fenomena Pasca Reformasi: Kajian Wacana Kritis. *Optimalisasi Hasil-Hasil Penelitian dalam Menunjang Pembangunan Berkelanjutan*, 1089-1097
- Jufri, J., & Tolla, Achmad. 2017. *Struktur Makna Simbolik dalam Wacana Korupsi Fenomena Pasca Reformasi: Kajian Kritis*. Makassar: Lembaga Penelitian Universitas Negeri Makassar.
- Rusdiarti, S. R. 2003. "Bahasa, Pertarungan Simbolik, dan Kekuasaan." *Jurnal Basis*, Edisi Khusus Pierre Bourdieu, No. 11-12 Tahun ke-52, November-Desember 2003.